

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04./10174/OTDA tentang Manual Penyusunan LPPD Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
8. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
11. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala penyusunan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan bidang tugas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang dikoordinasikan, serta mensinergikannya dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

KEDUA : Inspektur/Para Kepala Badan/Para Kepala Dinas/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris DPRD/Para Kepala Biro/Para Direktur RSUD/ Direktur RSKD, agar melaksanakan :

- a. penyusunan Data LPPD SKPD Tahun 2016 sesuai dengan sistematika dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini, dengan mengakomodir laporan dari UKPD/UPT yang berada di bawahnya;
- b. pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini;
- c. pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran III Instruksi Gubernur ini, yaitu Lampiran III.a yaitu untuk SKPD dengan satu urusan dan Lampiran III.b yaitu untuk SKPD dengan dua urusan;
- d. pengisian data sesuai dengan bidang tugas pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana format dalam Lampiran IV Instruksi Gubernur ini;

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diktum KEDUA kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai 10, Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat, Telepon 3822107/3822309 paling lambat Minggu Keempat bulan Februari 2017 dalam bentuk hardcopy dan softcopy diemail ke LPPD.DKI.2014@gmail.com;

- e. penyampaian data seorang pejabat yang ditunjuk sebagai penghubung (Liaison Officer/LO), yang menguasai informasi dan permasalahan pada SKPD masing-masing, dengan biodata sebagaimana tercantum pada Lampiran V Instruksi Gubernur ini, paling lambat Minggu Pertama bulan Februari 2017; dan
- f. penyampaian data/informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan terkait dengan LPPD kepada Tim Monitoring dan Evaluasi LPPD Tahun 2016 Provinsi DKI Jakarta serta kooperatif kepada Tim Teknis Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2016 yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Para Walikota dan Bupati agar merekapitulasi laporan/data dari Kecamatan dan Kelurahan dan memasukkannya ke dalam data pendukung LPPD Kota/Kabupaten Tahun 2016 Urusan Otonomi Daerah serta menyampaikan data LPPD Kota/Kabupaten kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan paling lambat Minggu Keempat bulan Februari 2017 dalam bentuk hard copy dan soft copy.

KEEMPAT : Laporan dari SKPD/UKPD yang dipecah atau digabung agar dikoordinasikan secara bersama antara SKPD/UKPD yang lama dan baru.

KELIMA : Biro Tata Pemerintahan menyelesaikan penyusunan LPPD Provinsi paling lambat Minggu Ketiga bulan Maret 2017, dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2017 serta melaksanakan monitoring dan evaluasi LPPD 2016 dan menerima Tim Teknis Nasional Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Tahun 2016 pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing SKPD/UKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2017

Gubernur Provinsi DKI Jakarta,



[Handwritten Signature]
D. Sumarsono, MDM
NIP. 195902221985031001

Tembusan

Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Nomor 7 TAHUN 2017
Tanggal 22 Januari 2017

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DATA LPPD SKPD

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi
2. Ruang lingkup sasaran

Diisi data-data obyek (sasaran) tugas SKPD. Contoh Dinas Pendidikan antara lain menerangkan jumlah siswa, jumlah guru, jumlah dan kualitas bangunan sekolah; Dinas PU antara lain menerangkan jumlah dan kualitas jalan (ruang, panjang dan luas jalan berdasarkan kelasnya) dalam bentuk tabel.

Catatan :

Khusus untuk Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi memasukkan uraian tentang :

- a. Data georafi (luas, batas wilayah, jumlah Kecamatan, Kelurahan, RT, RW)
- b. Data demografi :
 - Jumlah penduduk per kelompok umur (L/P);
 - Jumlah rumah tangga (per Kecamatan);
 - Jumlah rumah (per Kecamatan);
 - Jumlah rumah bersanitasi baik (per Kecamatan);
 - Jumlah rumah pengguna air bersih (per Kecamatan); dan
 - Tingkat kemiskinan (per Kecamatan).
- c. Data Kewilayahan lainnya.

B. Kelembagaan SKPD

Diisi nama dan bentuk kelembagaan serta pejabat pada SKPD/UKPD serta UPT yang ada di bawah SKPD yang bersangkutan.

BAB II VISI, MISI, RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS

A. Visi dan Misi SKPD

Diisi visi dan misi SKPD dalam mendukung Visi dan Misi Daerah

B. Rencana Strategis

Diisi nomor dan tanggal penetapan Renstra SKPD dan pokok-pokok Renstra dalam mewujudkan visi dan misi SKPD

C. Program Prioritas SKPD

Diisi program prioritas SKPD, terutama yang berkaitan dengan program prioritas daerah. Bila SKPD melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan, agar penulisannya dipisah. Contoh :

1. Program Prioritas Urusan.....
 - a.....
 - b.....
2. Program Prioritas Urusan.....
 - a.....
 - b.....

BAB III URUSAN DESENTRALISASI

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi

1. Anggaran Belanja, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib

No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
	Jumlah							

2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan

Rincian anggaran belanja, realisasi dan pelaksana untuk masing-masing urusan pilihan.

No.	Urusan Wajib	Belanja Tidak Langsung (Rp)	Belanja Langsung			Total Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	%
			Pegawai	Barang dan Jasa	Modal			
1	2	3	4	5	6	7 (3+4+5+6)	8	9 (8/7)
	Jumlah							

Catatan :

1. Dalam hal ini SKPD dianggap melaksanakan urusan pokok sesuai dengan kewenangan (urusan), tupoksi dan kelembagaannya. Satu SKPD dapat melaksanakan lebih dari satu urusan.
2. Yang dimaksud Urusan Wajib adalah :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan Hidup;
 - d. Pekerjaan Umum;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perumahan;

- h. Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Penanaman Modal;
- j. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
- k. Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan Pangan;
- n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan Informatika;
- r. Pertanahan;
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- t. Otonomi Daerah, PUM, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;
- x. Statistik;
- y. Perpustakaan; dan
- z. Kearsipan.

3. Yang dimaksud Urusan Pilihan adalah :

- a. Kelautan dan Perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Perindustrian;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur susunan organisasi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan daerah.

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan

1. Program dan Kegiatan

a. Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah

Contoh : Tabel Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah Urusan.....

No.	Program Nasional	Program Daerah
Jumlah		

b. Jumlah dan Realisasi Kegiatan Tahun 2016

Contoh : Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan.....

No.	Nama Program	Jml. Kegiatan	Realisasi Kegiatan	%
1	2	3	4	5 (4/3)
	Jumlah			

2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

a. Pencapaian SPM

Cantumkan daftar SPM dan pencapaiannya sesuai dengan urusan yang dilaksanakan selama periode RPJMD (2013-2017).

Bila belum ada SPM gunakan IKU SKPD atau bila dimungkinkan SPM dan IKU ditulis kedua-duanya. Dalam hal ini SPM bisa juga dijadikan IKU. Bila SKPD belum memiliki SPM dan IKU, cantumkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan yang merupakan program atau kegiatan unggulan yang mencakup target dan realisasi yang terukur.

Contoh : Tabel Capaian SPM/IKU Urusan

No.	Uraian SPM/IKU/ Tapkin	Target 2014-2017		Capaian Tahun		
		Volume	Satuan	2014	2015	2016

b. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV instruksi ini diuraikan pada bagian ini.

IKK sedapat mungkin menggambarkan data selama masa RPJMD atau minimal 2 tahun terakhir.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Menerangkan jumlah kualitas dan klasifikasi seluruh pegawai pada SKPD dan UKPD dalam satu SKPD.

a. Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel : Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai Dinas/Badan.....

No.	Klasifikasi	Dinas	Suku Dinas						Jumlah
			JP	JU	JB	JS	JT	KS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3 s.d 9)
A.	Golongan (jumlah)								
	• Golongan IV								
	• Golongan III								
	• Golongan II								
	• Golongan I								
B.	Eselon (jumlah)								
	• Eselon I								
	• Eselon II								
	• Eselon III								
	• Eselon IV								
	• Eselon V								
	• Fungsional								
	• Staf								
C.	Pendidikan(jumlah)								
	• S3								
	• S2								
	• S1								
	• Diploma								
	• SLTA								
	• SLTP								
	• SD								

Catatan :

Kolom 3 sampai 9 disesuaikan dengan kelembagaan yang ada pada SKPD masing-masing.

b. Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pangkat dan Diklatpim

Tabel : Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural pada Dinas/ Badan.....

No.	Eselon	Jumlah Jabatan	Jabatan yang Terisi	Jumlah Pejabat yang Memenuhi Persyaratan		
				Pendidikan	Pangkat	Diklatpim
1	2	3	4	5	6	7
	• Eselon I					
	• Eselon II					
	• Eselon III					
	• Eselon IV					
	• Eselon V					
	Jumlah					

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Merupakan akumulasi data dari SKPD, UKPD dan UPT dari SKPD yang bersangkutan.

Tabel : Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan.....

Uraian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3
Anggaran Urusan Pendidikan		
1. Belanja tidak langsung		
2. Belanja langsung		
a. Belanja Barang dan Jasa		
b. Belanja Pemeliharaan		
c. Belanja Modal		
d. Belanja Modal		
Catatan Perbandingan :		
• Alokasi Anggaran Urusan : APBD		
• Belanja Modal : Belanja urusan		
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Barang dan Jasa		
• Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan		

6. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses perencanaan SKPD sesuaikan dengan tupoksi baik merupakan top down yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP, RPJMD/RKPD dan RKT atau Renja SKPD) maupun bottom up, seperti usulan perbaikan sarana, prasarana dan lain-lain.

Contoh Tabel : Sinkronisasi perencanaan program urusan

No.	Dokumen	Jumlah Program	Perbandingan Jumlah Program	%
1.	RKPD 2016	10	RENJA SKPD; RKPD	100
2.	RENJA SKPD 2016	10	RKA: RENJA SKPD	100
3.	RKA 2016	10	DPA : RKA	100
4.	DPA 2016	10		

7. Kondisi Sarana dan Prasana yang digunakan

a. Prasarana berupa tanah (bila ada)

Diuraikan jumlah seluruh bidang tanah yang dikuasai (aset) SKPD dan jumlah bidang tanah yang telah dimanfaatkan (bila mungkin dengan luasnya)

b. Prasarana utama pendukung tupoksi

Contoh : Dinas Pendidikan menyajikan data jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, jumlah laboratorium sekolah dan lain-lain ; Dinas Olahraga dan Pemuda menyajikan data jenis dan jumlah fasilitas olah raga dan seterusnya.

c. Fasilitas/prasarana informasi

Contoh Tabel : Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Dinas/Badan.....

No.	Jenis Fasilitas/Prasaran	Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin								Jumlah
		Dinas	JP	JU	JB	JS	JT	KS	UPT	
	Papan Pengumuman									
	Kotak Pengaduan									
	Media Massa									
	Email									

Catatan :

- Website :
- Email :

d. Prasarana dan sarana lain yang patut dilaporkan

8. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta solusi pemecahannya.

Contoh : Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan Tahun 2016 di DKI Jakarta antara lain :

- a. Saat ini dibutuhkan banyak pegawai sebagai penjaga sekolah, guru olahraga dan guru lainnya;
- b. Terdapat 233 (dua ratus tiga puluh tiga) SDN dan 39 (tiga puluh sembilan) SMPN yang berada di daerah rawan banjir; dan
- c. Masih banyak fasilitas gedung yang perlu direhabilitasi seperti ruang perpustakaan, laboratorium, ruang UKS serta rumah dinas Kepala Sekolah/guru/penjaga sekolah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap menambah SDM aparatur dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kekurangan penjaga sekolah antara lain diatasi dengan petugas harian lepas (Phl) yang dibiayai oleh sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penambahan tenaga guru dilakukan sesuai dengan formasi dan prioritas rekrutmen pegawai; perbaikan gedung dan prasarana sekolah lainnya dilakukan dengan rehabilitasi ringan sampai rehabilitasi berat/total.

9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

- a. Daftar dasar hukum pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik sesuai dengan urusan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Perda, Pergub atau Keputusan Kepala SKPD (contoh tentang pedoman, juklak, juknis, SOP dan lain-lain);
- b. Hal-hal yang bersifat inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pelaksanaan tugas dan fungsi, baik yang bersifat SDM, prosedur, teknologi informasi dan lain-lain; dan
- c. Prestasi nasional dan internasional yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

- c. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan (disesuaikan dengan urusan yang menjadi tupoksi).

Diuraikan persis sama dengan Sub B dengan penambahan pada poin 2 yaitu Realisasi Program dan Kegiatan sehingga menjadi total 10 poin.

d. Indikator Kinerja Kunci (IKK).

1. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta data terlampir (Lampiran II).

2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran III.a dan Lampiran III.b.

3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan.

Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, tingkat pencapaian kinerja urusan wajib dan pilihan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lampiran IV).

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

1. Dasar hukum
2. Instansi pemberi tugas pembantuan
3. Program dan kegiatan
4. Realisasi pelaksana program dan kegiatan
5. Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan
7. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
8. Kondisi sarana dan prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang mencukupi atau lainnya)
9. Permasalahan dan solusi
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan

1. Dasar hukum
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota untuk Provinsi
3. Sumber dan jumlah anggaran
4. Sarana dan prasarana

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerja Sama Antar Daerah

1. Daerah yang diajak kerja sama
2. Dasar hukum
3. Bidang kerja sama
4. Nama kegiatan
5. Satu Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerja Sama Antar Daerah
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7. Sumber dan jumlah anggaran
8. Jangka waktu kerja sama
9. Hasil (output) dari kerja sama
10. Permasalahan dan solusi
11. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

B. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

Diuraikan persis sama dengan Sub A

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

1. Forum koordinasi
2. Materi koordinasi
3. Instansi vertikal yang terlibat
4. Sumber dan jumlah anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan
8. Hasil dan manfaat koordinasi
9. Tindak lanjut hasil koordinasi
10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu ditindaklanjuti)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaran Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (sesuaikan dengan tupoksi/kegiatan)

1. Bencana yang terjadi dan penanggulangannya
2. Status bencana (nasional, regional/provinsi atau lokal/Kabupaten/Kota)

3. Sumber dan jumlah anggaran
4. Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
7. Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana
8. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis kawasan khusus
2. Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerja sama) dan Dasar Hukum penetapannya
3. Sumber anggaran
4. Permasalahan yang dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kawasan khusus
6. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani
3. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
4. Penanggulangan dan kendalanya
5. Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan
6. Sumber dan jumlah anggaran

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berisi rangkuman evaluasi dan kajian/analisis secara menyeluruh tentang materi laporan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V yang berupa pernyataan-pernyataan, misalnya :

Program ini (disebutkan) berjalan lancar dan berhasil sesuai rencana, atau pelaksanaan kegiatan ini (sebutkan) tidak mencapai target yang ditentukan, karena sebab-sebab tertentu (sebutkan sebab-sebabnya).

Hambatan yang menonjol adalah penyebab kurang lancarnya pelaksanaan pekerjaan seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait atau terlalu sempitnya waktu pelaksanaan dan sebagainya.

B. Saran

Berisi gagasan atau pemikiran untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Saran juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, misalnya :

Sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada yang berhak sebagai akibat tanahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan waduk oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maka disarankan agar dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh kepastian kepemilikan tanah dan status tanahnya.



Pit. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Dr. Sumarsono
Dr. Sumarsono, MDM.

NIP. 195902221985031001

Nomor 7 TAHUN 2017
Tanggal 22 Januari 2017

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capain Kinerja	Keterangan
1	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Peraturan ttg ketertiban penataan ruang	1	Kab/kota memiliki Perda IMB	Jumlah kab/kota memiliki perda IMB dibagi jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi	- Jumlah kab/kota yang memiliki perda IMBkabupaten/kota - Jumlah kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD dalam provinsi.....kab/kota%	
					Peraturan ttg kependudukan	2	Pengurusan E-KTP	Jumlah Penduduk yang sudah terekam dalam E-KTP dibagi jumlah Penduduk yang Wajib ber KTP
		Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk				Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2016 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.
					Penyampaian laporan kepada pemerintah	4	Ketepatan waktu penyampaian LPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007	Waktu Penyampaian LPPD 2015 (tanggal/bulan/tahun)
		Penyampaian laporan keuangan dan kinerja	5	Ketepatan waktu penyampaian Lap Keuangan berdasarkan PP 8/2006				Waktu Penyampaian Laporan Keuangan 2015 berdasarkan bukti tanda terima(tanggal/bulan/tahun)
					Implementasi Standar Pelayanan Minimal(SPM)	6	Ketepatan waktu penyampaian Lap Kinerja berdasarkan PP8/2006	Waktu Penyampaian Laporan Kinerja 2015 berdasarkan bukti tandat terima (tanggal / bulan / tahun)
		7	Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPMnya yang diterbitkan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah	Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota dibagi Jumlah Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD				Total urusan yang sudah diterapkan SPM pada seluruh Kab/kota 1. Kab/kota xxx Urusan, 2. Kab/kota xxx Urusan 3. Kab/kota xxx Urusan 4. Kab/kota xxx Urusan, dst

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun2016)	Capain Kinerja	Keterangan
3	KESELARASAN ANTARA KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH	Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	8	Frekuensi Kerja sama dengan daera hlain	Jumlah MoU yang masih berlaku tahun 2016 1. No dan tgl MoU yang berlaku s.d.tahun 2016 2. No dan tgl MoU yang berlaku s.d tahun 2016 3. 3. Dst...	Jumlah MOU yang masih berlaku tahun 2016 1. No..../MoU.1-Huk/2016 2. No..../MoU.2-Huk/2016 3. Dst...MOU	
		Sinkronisasi Pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah	9	Kesesuaian prioritas pembangunan	Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang mendukung prioritas pembangunan nasional dibagi 11 Program Prioritas Pembangunan Nasional.	Daftar Prioritas Daerah yang tercantum dalam RKPD 2016 yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prioritas%	
		Kewenangan	10	Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota Jumlah kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan.	Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota Jumlah kabupaten/kota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan%	
			11	Waktu penetapan perda APBD 2016	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2016	Tanggal Penetapan PERDA APBD 2016		
			12	Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005	Ada/tidak	
		Keuangan	13	Belanja untuk pelayanan dasar	Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagi jumlah total belanja	Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2016 : 1) Urusan Pendidikan Rp. ---- 2) Urusan Kesehatan Rp. ---- 3) Urusan Lingkungan hidup Rp. ---- 4) Urusan PU Rp. ---- 5) Urusan Sosial Rp. ---- 6) Urusan Tenaga Kerja Rp. ---- 7) Urusan Koperasi Rp. ---- 8) Urusan Satpol PP Rp. ---- 9) Urusan Kependudukan & Capil Rp. ---- Total Belanja APBD Rp. ----%	

1 Program prioritas pembangunan nasional : (1)Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola ;(2)Pendidikan ;(3)Kesehatan; (4)Peningkatan kemiskinan; (5)Ketahanan pangan; (6)Infrastruktur; (7)Iklim investasi dan iklim usaha; (8)Energy; (9)Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10)Daerah tertinggal,terdepan,terluar dan pasca konflik,dan (11)Kebudayaan,kreatifitasdan inovasi teknologi

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan
		Pelayanan Publik	14	Belanja untuk urusan pendidikan dan kesehatan	Jumlah belanja urusan pendidikan dan kesehatan dibagi jumlah total belanja	Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan : 1. Ur Pendidikan 2. Ur Kesehatan%	
			15	Keberadaan PERDA tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Ada atau tidak Perda tentang Pelayanan Publik	Perda tentang Pelayanan Publik	Ada/Tidak	
	Kepegawaian		16	Ratio PNS terhadap penduduk	Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2016 dibagi Penduduk pada akhir tahun 2016	- Jumlah PNS Provinsi akhir tahun 2016 - Penduduk pada akhir tahun 2016	-----	
			17	Sistem Informasi Kepegawaian	Ada atau tidak adanya data base kepegawaian	1. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #1 2. Jenis Sistem Informasi Kepegawaian #2	Ada/tidak	
4	EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRD	Kelembagaan	18	Kesesuaian SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007	Jumlah SKPD, sbb : 1) Bagian (Setda) = ----- unit 2) Dinas = ----- unit 3) Badan = ----- unit 4) Kantor = ----- unit 5) Rumah Sakit = ----- unit 6) Lembaga Teknis lainnya 7) Kabupaten/kota = ----- unit	-----unit	
			19	Jumlah perda tahun 2016	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016	Jumlah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2016 1. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2016 2. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2016 3. No dan Tgl PERDA yang ditetapkan tahun 2016Perda	
5	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD	Raperda yang diajukan tahun berjalan	20	Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2015	RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2016 dibagi RAPERDA yang diusulkan tahun 2016	- Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 - Raperda yang diusulkan DPRD tahun 2016	...%	
			21	Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh Pemda	Jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016 dibagi Keputusan DPRD dalam tahun 2016	- Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti oleh DPRD dalam tahun 2016 - Keputusan DPRD dalam tahun 2016%	

³Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang mengukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang menetapkan indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/Pimpinn LPND.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan
6	EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KEPALA DAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN	Tindak lanjut keputusan Gubernur (Kep Peraturan Gubernur (PerGub)	22	Keputusan Gubernur yang ditindaklanjuti	Jumlah Kep Gub yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Kep Gub dalam tahun 2016	- Keputusan Gubernur tahun 2016 yang ditindaklanjuti - Keputusan Gubernur tahun 2016 yang ditindaklanjuti. - Peraturan Gubernur tahun 2016 %	
7	KETAATAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Perda yang dibatalkan	24	Jumlah perda yang dibatalkan	Jumlah perda yang dibatalkan dibagi jumlah perda yang dikirimkan ke pemerintah untuk dievaluasi	- PERDA yang dibatalkan - PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah %	
8	INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KONSULTASI PUBLIK ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGIS DAN RELEVAN UNTUK DAERAH	Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	25	Keberadaan perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada atau tidak ada Perda atau PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak ada PERDA/PerGub tentang konsultasi publik	Ada/tidak	
9	TRANSPARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI/PENCAIRAN DAN PENYERAPAN DAU, DAK DAN BAGI HASIL	Serapan dana perimbangan	26	Adanya media informasi perda yang dapat diakses oleh publik (website, kotak pos, bag/biro, humas, leaflet/brosur)	Ada atau tidak ada media informasi yang ditetapkan dengan Pergub	1. Print Out Halaman depan Web. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #1 2. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2 3. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #3 Dst...	Ada/tidak	
			27	Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan	Jumlah Dana perimbangan yang terserap Tahun 2015 dibagi Dana perimbangan	- Dana perimbangan yang terserap Tahun 2016 - Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APBD tahun 2016 %	
			28	Alokasi Belanja pada APBD dari DAU	Total belanja langsung dibagi DAU tahun 2016 x 100%	- Belanja Langsung (Realisasi) - DAU Tahun 2016 %	
			29	Alokasi Belanja pada APBD	Total Belanja langsung tahun 2015 (realisasi) dibagi Total Belanja APBD tahun 2016 x 100%	Total Belanja langsung tahun 2016 (realisasi) %	
10	INTENSITAS, EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PEMUNGUTAN SUMBER-SUMBER PAD DAN PINJAMAN/ OBLIGASI DAERAH	Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD)	30	Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dim APBD (Realisasi)	Jumlah PAD (Realisasi) Tahun 2016 dibagi Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016 x 100%	- PAD APBD (Realisasi) Tahun 2016 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016 %	

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Perhitungan	Jenis Data (Tahun 2016)	Capaian Kinerja	Keterangan
11	EFEKTIVITAS PERENCANAAN, PENYUSUNAN, PELAKSANAAN TATAUSAHA, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN APBD	Kewajaran Laporan Keuangan (Lapkeu)	31	Opini BPK terhadap LapKeu Daerah	Jenis Opini BPK terhadap Hasil Laporan Keuangan Daerah	- Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2015 - Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2016	Opini tahun 2015=----- Opini tahun 2016=-----	Opini: 1) WTP 2) WDP 3) Disclaimer 4) TIDAK WAJAR
		Besaran SILPA	32	SILPA thdp total pendapatan	SILPA tahun 2016 dibagi Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016 x 100%	- SILPA Tahun 2016 - Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2016 %	
		Realisasi Pendapatan	33	Realisasi terhadap PAD anggaran	Realisasi PAD thn 2016 dibagi anggaran pendapatan 2016	- Realisasi PAD Tahun 2016 - Anggaran Pendapatan dalam APBD 2016 %	
		Realisasi belanja	34	Realisasi belanja thd anggaran belanja	Realisasi belanja dibagi total anggaran belanja dalam APBD x 100%	- Realisasi Belanja Tahun 2016 - Total Anggaran Belanja dalam APBD tahun 2016 %	
		Pengawasan Inspektorat Provinsi	35	Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan temuan BPK RI PER 31 Des 2016	- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada tahun 2016. - Jumlah Temuan BPK RI per 31/12/2016 %	
12	PENGELOLAAN POTENSI DAERAH	Peta potensi daerah	36	Realisasi PAD 2016 terhadap potensi PAD	Realisasi PAD 2016 dibagi dengan potensi PAD 2016	- Realisasi PAD Tahun 2016 - Potensi PAD Pada tahun 2016 %	
		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37	Peningkatan PAD	(PAD 2016 - PAD 2015) : PAD 2015 x 100%	- Total PAD pada tahun 2016 - Total PAD pada tahun 2015 %	
13	TEROBOSAN/NOVASI BARU DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	Pengadaan barang dan jasa	38	Penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemda dalam tahun 2016	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016	Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2016 Pengghargaan	
		Pengadaan barang dan jasa	39	Keberadaan E-procurement	Ada atau tidak ada Perda/Keputusan KDH tentang E-Procurement	ada/tidak ada PERDA tentang E-Procurement	Ada/Tidak	
		Daya saing daerah	40	Jumlah persetujuan investasi	Jumlah Realisasi ijin investasi dalam tahun 2016	Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2016	... ijin	

³ Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD



Pdt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Sumarsono, MDM.

NIP. 195902221985031001

Nomor 7 TAHUN 2017
Tanggal 22 Januari 2017

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI
UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

PROVINSI :
NAMA SKPD :

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (Sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jeris Data	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional 1 (yang melekat dikementrian/LPND) yang harus Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementrian/LPNK	1	Jumlah Program Nasional yg Dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dbagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program nasional yang diaksanakan SKPD%	Lihat Program Nasional RKP 2016 Untuk masing-masing urusan, terlampir.
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada / tidak SOP	Jumlah SOP: SOP #1 Pelaksanaan UN SOP #2 Penerimaan Siswa Baru SOP #3 Juknis Kalender Pendidikan Dst...	Ada..... SOP/tidak ada :%	SOP adalah petunjuk tertulis Mengetal apa yang harus dilakukan,kapan,dimana,oleh siapa,bagaimana cara melakukan,apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kritena(NSPK)yang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis
3	PENATAAN KELEMBAGAAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakanmenurut PERMEN x 100%	Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang ada Jumlah PERDA Pelaksanaan PERMEN yang seharusnya ada %%	
			4	Struktur jabatan dan eselonering yangterisi	Jumlah jabatan yang ada (yang difisi) dibagi jumlah jabatan yang harus adax 100%	- Jumlah jabatan yang ada - Jumlah jabatan yang harus ada%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #1 Dst...	Ada/tidakada	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAI/ANDAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	- Jumlah PNS SKPD - Jumlah PNS Provinsi	Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2016
			7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Jumlah Pejabat yang memenuhi persyaratan Diklatipim - Jumlah pejabat SKPD yang ada.%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun2016
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Jumlah pejabat SKPD yang memenuhi persyaratan kepegangatan - Jumlah pejabat SKPD yang ada%	Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun2016
5	PERENCANAAN PEMBANGUNANDA ERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD - RENSTRA SKPD - RENJASKPD - RKA-SKPD	ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Jumlah dokumen perencanaan yang ada - RENSTRA SKPD - RENJASKPD - RKA-SKPDjenis dokumen	
			10	Jumlah Program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Jumlah program RPKD yang diakomodir dalam Renja SKPD - Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD%	Mengacu dokumen RPKD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
			11	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	- Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD - Jumlah Program dalam RKA SKPD%	Mengacu dokumen RKA-SKPD Tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	- Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD - Jumlah Program dalam RKA SKPD%	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian	Keterangan	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran SKPD terhadap total belanja	$\text{Alokasi anggaran SKPD} \div \text{dibagi total APBD} \times 100\%$	Total anggaran SKPD Total belanja APBD (anggaran) %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD	$\text{Belanja Modal} \div \text{dibagi total belanja SKPD} \times 100\%$	- Realisasi Belanja Modal SKPD - Realisasi Total Belanja SKPD%	Mengacu LKD tahun 2016	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dan total belanja barang dan jasa	$\text{Total Belanja Pemeliharaan} \div \text{dibagi belanja barang dan jasa SKPD} \times 100\%$	Total Belanja pemeliharaan dan total belanja barang dan jasa	- Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD - Realisasi Belanja Barang dan Jasa SKPD%	Mengacu LKD tahun 2016
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD	$\text{Total Belanja pemeliharaan} \div \text{dibagi total belanja SKPD} \times 100\%$	Total Belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Realisasi Belanja Pemeliharaan SKPD - Total Realisasi Belanja%	Mengacu APBD tahun 2016
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD bentuk komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak----jenis, sbb: 1..... 2.....	Laporan keuangan SKPD	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)	
		Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.	Ada/ tidak ada	Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.	
Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak----asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak----asset.%				

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya : 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Jumlah sebanyak----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	abla Ada, sebutkan survey kepuasan tentang-----	Ada/tidakada	Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD



Pdt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Sumarsono, MDM
NIP. 195902221985031001

Nomor 7 TAHUN 2017
Tanggal 22 Januari 2017

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI
UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

PROVINSI :
NAMA SKPD :
URUSAN YANG DILAKSANAKAN :

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

1. Urusan -----
2. Urusan ----- (Sebutkan urusan-urusan yang diselenggarakan oleh SKPD ybs)

No.	Aspek (2)	Fokus (3)	No. (4)	IKK (5)	Rumus/Persamaan (6)	JenisData		CapaianKinerja		Keterangan
						Urusan(1)--- (7A)	Urusan(2)--- (7B)	Urusan(1)--- (8A)	Urusan(2)--- (8B)	
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR AN URUSAN Pemerintahan	Program Nasional(yang melekat di kementerian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak-----program. - Jumlah program nasional Yang dilaksanakan SKPD, sebanyak----- program	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak----- program. - Jumlah program nasional Yang dilaksanakan SKPD, sebanyak-----program% %% %	(9)
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen/ LPND	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Ada atau tidak ada	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak-- yang terdiri dari: 1. SOP tlg----- 2. SOP tlg----- 3. SOP tlg----- 4. Dst-----	Apabila Ada, Sebutkan ada banyak----- yang terdiri dari: 1. SOP tlg----- 2. SOP tlg----- 3. SOP tlg----- 4. Dst-----	Ada----- --SOP/ TidakAda:	Ada----- --SOP/ TidakAda:	Sesua urusan.
3	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri(PERMEN tentang SPM)	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tlg SPM	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN tlg SPM x 100%	- PERDA pelaksanaan sebanyak-----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak SPM	- PERDA pelaksanaan sebanyak-----. - PERDA yang seharusnya, sebanyak-----%%%%	1. SPM Kesehatan 2. SPM Sosial 3. SPM Pendidikan 4. SPM Lingkungan Hidup 5. SPM BKKBN 6. SPM Pemberdayaan Perempuan.

No.	Aspek	Fokus	No.	IKK	Rumus/Persamaan	JenisData		CapaianKinerja		Keterangan
						Urusan(1)---	Urusan(2)---	Urusan(1)---	Urusan(2)---	
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	(4)	(5)	(6)	Urusan(1)---	Urusan(2)---	(8A)	(8B)	(9)
			4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	(7A)	(7B)%%	
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,-----	Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional,-----	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	
4	PENGLOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	PNS yang menangani urusan(1)SKPD, sebanyak-----personil - Total PNS Provinsi, sebanyak-----personil	PNS yang menangani urusan(2)SKPD, sebanyak-----personil - Total PNS Provinsi, sebanyak-----personil	-----	-----	Lihat Petunjuk pengisian IKK
			7	Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak-----org. - Pejabat yang ada, sebanyak-----org.	Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak-----org. - Pejabat yang ada, sebanyak-----org.	-----%	-----%	
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepegangatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepegangatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak-----org. - Jabatan yang ada, sebanyak-----jbt.	Pejabat yang memenuhi kepegangatan, sebanyak-----org. - Jabatan yang ada, sebanyak-----jbt.	-----%	-----%	
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Apabila Ada, Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014, yang terdiri dari : 1..... 2..... 3.....	Apabila Ada, Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014, yang terdiri dari : 1..... 2..... 3.....jenis dokumenjenis dokumen	

No. (1)	Aspek (2)	Fokus (3)	No. (4)	IKK (5)	Rumus/Persamaan (6)	JenisData		CapaianKinerja Urusan(1)---- (8A) Urusan(2)---- (8B)	Keterangan
						Urusan(1)---- (7A)	Urusan(2)---- (7B)		
		Sinkronisasi Program RENUJA SKPD dengan Program RKPDP	10	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENUJA SKPD dibagi jumlah RENUJA SKPD	Jumlah Program RKPDP yang diakomodir dalam RENUJA SKPD dibagi jumlah RENUJA SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD x 100%	Program RKPDP yang diakomodir dalam RENUJA SKPD, sebanyak----- ----- program. Program Renuja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak-----% %	Mengacu dokumen RKPDP tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.	
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENUJA SKPD	11	Jumlah Program RENUJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENUJA RKPDP yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	Program RENUJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD,sebanyak----- --program. Program dalam RKA SKPD,sebanyak----- program.% %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.	
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENUJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENUJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	Program RENUJA SKPD yang diakomodir dalam DP SKPD,sebanyak----- ----- program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak----- program.% %	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2016	
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Realisasi anggaran	13	Realisasi belanja SKPD terhadap total belanja APBD	Realisasi belanja SKPD dibagi total APBD x 100%	Total realisasi belanja SKPD, sebesar Rp,----- Total Belanja APBD, sebesar Rp,-----% %	Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2016	
		Besaran belanja modal	14	Belanja modal terhadap total belanja SKPD (realisasi)	Belanja modal dibagi total belanja SKPD x 100%	Belanja Modal SKPD, sebesar Rp,----- Total Belanja SKPD, sebesar Rp,-----% %	Mengacu LKD tahun 2016	

No.	Aspek (2)	Fokus (3)	No. (4)	IKK (5)	Rumus/Persamaan (6)	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Urusan(1)---- (7A)	Urusan(2)---- (7B)	Urusan(1)---- (8A)	Urusan(2)---- (8B)	
		Besaran belanja pemeliharaan	15	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp.%%%%	Mengacu LKD tahun 2016
			16	Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)	Total belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD x 100%	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. - Total belanja SKPD, sebesar Rp.	- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. - Total belanja SKPD, sebesar Rp.%%%%	Mengacu APBD tahun 2016
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak----- jenis, sbb : 1..... 2..... 3.....	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak----- jenis, sbb : 1..... 2..... 3.....	Tidak Ada/Ada sebanyak----- jenis	Tidak Ada/Ada sebanyak----- jenis	Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, CaLK)
7	PENGELOLAAN BANGUNAN MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD Penggunaan Asset SKPD	18 19	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100%	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Asset yang tidak digunakan, sebanyak----- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak----- asset.	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya - Asset yang tidak digunakan, sebanyak----- asset. - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak----- asset.	Ada/ tidak ada %	Ada/ tidak ada %	Inventarisasi dilakukan minimal 1kali dalam 5Tahun
8	PEMBERIAN FASILITAS TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas/prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Sebutkan jenisnya 1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	Jumlah sebanyak----- jenis.	Jumlah sebanyak----- jenis.	Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

No. (1)	Aspek (2)	Fokus (3)	No. (4)	IKK (5)	Rumus/Persamaan (6)	Jenis Data		Capaian Kinerja		Keterangan
						Urusan(1)--- (7A)	Urusan(2)--- (7B)	Urusan(1)--- (8A)	Urusan(2)--- (8B)	
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh SKPD (9)



Pit. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

[Handwritten Signature]

Drs. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001

**IKK TATARAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD
TERHADAP LPPD TAHUN 2016**

No. (1)	Urusan (2)	No. (3)	IKK (4)	Rumus (5)	Capaian Kinerja (6)	Keterangan (7)
1	URUSAN WAJIB Pendidikan					
1		1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI}} \times 100\%$%	
2		2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS}} \times 100\%$%	
3		3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA}} \times 100\%$%	
4		4	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SD/MI}} \times 100\%$%	
5		5	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SMP/MTS}} \times 100\%$%	
6		6	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi}}{\text{Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA}} \times 100\%$%	
7		7	Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan	Peta penjaminan mutu pendidikan	Ada/tidak*)	
2	Kesehatan	8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$%	
		9	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$%	

No. (1)	Urusan (2)	No. (3)	IKK (4)	Rumus (5)	Capaian Kinerja (6)	Keterangan (7)
URUSAN WAJIB						
3	Lingkungan Hidup	10	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization(UCI)	Jumlah Desa/Kelurahan UCI x 100% Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	%	
		11	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun wkt tertentu x 100%%	
		12	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama x 100%%	
		13	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn x 100%%	
		14	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn x 100%%	
		15	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama x 100%%	
		16	Pencemaran Udara	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 x 100%%	
		17	Pasar	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu x 100%%	
		18	Tempat pembuangan sampah (TPS)	Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama x 100%%	
		19	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient Dikawasan pemukiman atau industri x 100%%	
		20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik x 100%%	
		20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Jumlah seluruh pasar tradisional x 100%%	
		20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Jumlah daya tampung TPS (m3) x 1000%	
		20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda x 100%%	
		20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100%%	
		20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baikx100%%	
		20	Jalan provinsi dalam kondisi baik	Panjang seluruh jalan provinsi%	

No. (1)	Urusan (2)	No. (3)	IKK (4)	Rumus (5)	Capaian Kinerja (6)	Keterangan (7)
URUSAN WAJIB						
5	Tata Ruang	21	Rumah tangga bersanitasi	Jumlah rumah tangga ber sanitasi x 100 %%	
		22	Kawasan kumuh	Jumlah seluruh rumah tangga x 100 %%	
		23	Rasio ruang terbuka hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas Kawasan Kumuh x 100 %%	
		24	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD	Luas Wilayah x 100 %%	
		25	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD	Luas ruang terbuka hijau x 100 %%	
		26	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD	Luas wilayah ber HPL/HGB x 100 %%	
		27	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada/tidak	Ada/tidak*)	
7	Perumahan	28	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah program RKPD tahun berkenaan x100% Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan%	
		29	Rumah layak huni	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga%	
8	Keperumudaan & Olahraga	30	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah rumah layak huni x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda ybs.%	
		31	Lapangan olah raga	Jumlah gelanggang/balai remaja di Kota x 1000 Jumlah penduduk%	
9	Penanaman Modal	32	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Jumlah lapangan olahraga yang ada x 1000 Jumlah penduduk%	
10	Koperasi & UKM	33	Koperasi aktif	Realisasi PMDN thn 2015- Realisasi PMDN 2014 x100% Realisasi PMDN 2015 Jumlah Koperasi aktif x 100 % Jumlah seluruh koperasi%	

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
		34	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil x 100%%	
11	Kependudukan & Catatan Sipil	35	Ketersediaan data base kependudukan skala provinsi	Jumlah seluruh UKM Ada/tidak ada	Ada/tidak ada	
12	Ketenaga kerjaan	36	Pelayanan kepesertaan jaminan sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif x 100%%	
		37	Pencari kerja yang sudah ditempatkan	Jumlah pekerja/buruh Jumlah pencari kerja yang ditempatkan x 100 %%	
13	Ketahanan Pangan	38	Regulasi ketahanan pangan	Jumlah pencari kerja yang mendaftar Ada / Tidak	Ada/tidak ada	
		39	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) x 1000%	
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40	Partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	Jumlah penduduk Pekerja perempuan dilembaga pemerintahx100%%	
		41	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah pekerja perempuan Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan x 100%%	
15	KB&KS	42	Tingkat prevalensi peserta KB aktif	Jumlah angkatan kerja perempuan Jumlah peserta program KB aktif x 100%%	
		43	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB(P LKB/PKB) setiap desa/kelurahan	Jumlah pasangan usia subur Jumlah desa/kelurahan PLKB/PKB x 100%%	
16	Pertubungan	44	Angkutan darat dibandingkan dengan jumlah penumpang	Jumlah angkutan darat Jumlah penumpang angkutan darat%	
17	Komunikasi&Informatika	45	Website milik pemerintah daerah	Ada/Tidak	Ada/tidak ada	
		46	Pameran/expo	Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan pertahun	
18	Pertanian	47	Luas lahan bersertifikat	Luas lahan bersertifikat di suatu daerah Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah x 100%%	

No.	Usuran	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
19	Kesbang&Politik	48	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	
		49	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	
20	Otonomi Daerah	50	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi	
		51	Tapal batas	Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan x 100%%	
21	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	52	PKK aktif	Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan x 100 % Jumlah PKK aktif%	
22	Sosial	53	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan x 100%%	
23	Budaya	55	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	
		56	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	
24	Statistik	57	Buku propinsi dalam angka	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	
		58	Buku PDRB provinsi	Ada/Tidak	Ada/ tidak*	
25	Kearsipan	59	Pengelolaan arsip secara baku	Ada/Tidak	Ada/ tidak*	
		60	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku Jumlah SKPD x 100%%	
26	Perpustakaan	61	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan daerah	Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	
		62	Pengunjung perpustakaan	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia dipergustakaan daerah Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia dipergustakaan daerah Jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani	

No.	Urusan	No.	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
URUSAN WAJIB						
1	Kelautan & perikanan	1	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton/tahun) Target Daerah (Ton/tahun) x 100%%	
2		2	Ekspor hasil perikanan	Nilai export hasil perikanan (Rp) Target daerah%	
3		3	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) Target Daerah (Kg)%%	
2	Pertanian	4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)%	
5		5	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2016**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian Jumlah total PDRB%	
3	Kehutanan	6	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi Luas total hutan dan lahan kritis%	
7		7	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan%	
8		8	Pertambangan tanpa ijin	Luas Penambangan Liar yang diterbitkan Luas area penambangan yang liar%%	
5	Pariwisata	9	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2016**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan Jumlah total PDRB%	
10		10	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahunorang	
6	Industri	11	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2016**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata Jumlah total PDRB%	
12		12	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Tahun 2016**)	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor industri Jumlah total PDRB%	
13		13	Pertumbuhan Industri secara keseluruhan	Jumlah Industri tahun 2016 - Jumlah Industri tahun 2015 Jumlah Industri s/d tahun 2016%	

No. (1)	Urusan (2)	No. (3)	IKK (4)	Rumus (5)	Capaian Kinerja (6)	Keterangan (7)
URUSAN WAJIB						
7	Perdagangan	14	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan x 100% Jumlah total PDRB%	
		15	Ekspor Bersih Perdagangan	nilai ekspor bersih = nilai ekspor-nilai impor	US\$.....	
8	Transmigrasi	16	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa x 100% Jumlah transmigran%	

Keterangan
*)pilih salah satu
**)Apabila belum tersedia gunakan PDRB Tahun 2015

TATA CARA PENGISIAN LAMPIRAN IV

No.	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
1.	Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI 2. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI 3. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS 4. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMP/MTS 5. Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA 6. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMA/MA 7. Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 8. Jumlah Guru jenjang SD/MI 9. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 10. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS 11. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi 12. Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA 13. Peta penjaminan mutu pendidikan 	Dinas Pendidikan
2.	Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 3. Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 4. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama 5. Jumlah Desa/Kelurahan UCI 6. Jumlah seluruh Desa/Kelurahan 7. Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan di saat wilayah kerja pada kurun waktu tertentu 8. Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama 9. Jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. RSUD Tarakan 3. RSUD Koja 4. RSUD Budhi Asih 5. RSUD Pasar Rebo 6. RSUD Cengkareng 7. RSUD Pasar Minggu 8. RSKD Duren Sawit

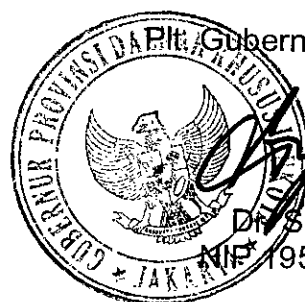
No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
		10. Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 11. Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 tahun 12. Jumlah penderita DBD yang ditemukan di 1 (satu) wilayah dalam kurun waktu yang sama 13. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 14. Jumlah seluruh masyarakat miskin 15. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan Sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	
3.	Lingkungan Hidup	1. Jumlah Kabupaten dan Kota yang dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri 2. Jumlah pasar tradisonal yang tergolong baik 3. Jumlah seluruh pasar tradisional 4. Jumlah daya tampung TPS (m3) 5. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dari jumlah kasus yang ada 6. Jumlah kasus lingkungan yang ada	1. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah 2. Dinas Kebersihan
4.	Pekerjaan Umum	1. Panjang jalan Provinsi dalam kondisi baik 2. Panjang seluruh jalan Provinsi 3. Jumlah rumah tangga bersanitasi 4. Jumlah total rumah tangga 5. Luas kawasan kumuh 6. Luas wilayah	1. Dinas Tata Air 2. Dinas Bina Marga 3. Dinas Kebersihan 4. Dinas Pertamanan dan Pemakaman
5	Tata Ruang	1. Luas ruang terbuka hijau 2. Luas wilayah ber HPL/HGB	Dinas Penataan Kota
6.	Perencanaan dan Pembangunan	1. Perda RPJPD 2. Perda RPJMD 3. Perda RKPD 4. Jumlah program RKPD tahun 2016 5. Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2016 6. Prioritas Daerah dalam RKPD tahun 2016 yang sesuai dengan prioritas Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7.	Perumahan	1. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 2. Jumlah seluruh rumah tangga 3. Jumlah rumah layak huni 4. Jumlah seluruh rumah 5. Perda tentang IMB	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
8.	Kepemudaan dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Gelanggang/Balai Remaja (milik pemerintah) 2. Jumlah lapangna olahraga milik Pemda 3. Jumlah Penduduk tahun 2016 	Dinas Olahraga
9.	Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai realisasi PMDN 2015 (miliar rupiah) 2. Nilai realisasi PMDN 2016 (miliar rupiah) 3. Jumlah proyek PMDN 4. Nilai realisasi PMA 2015 (miliar rupiah) 5. Nilai realisasi PMA 2016 (miliar rupiah) 6. Jumlah proyek PMA 	Badan Penanaman Modal dan BUMD
10.	Koperasi & UKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah koperasi aktif 2. Jumlah koperasi 3. Jumlah Usaha Mikro & Kecil 4. Jumlah seluruh UKM 5. Jumlah total PDRB tahun 2016 6. Nilai ekspor dan impor DKI Jakarta tahun 2016 	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
11	Kependudukan dan Catatan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan database kependudukan 2. Perda tentang kependudukan 3. Jumlah penduduk DKI Jakarta per Desember 2016 4. Jumlah penduduk DKI Jakarta yang telah terekam E-KTP 	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Ketenakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif 2. Jumlah pekerja/buruh 3. Jumlah pencari kerja yang mendaftar 4. Jumlah pencari kerja yang ditempatkan 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen regulasi ketahanan pangan 2. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama 	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerja Perempuan di lembaga pemerintah 2. Jumlah pekerja perempuan 3. Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan 4. Jumlah angkatan kerja perempuan 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan KB
15.	KB & KS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pasangan usia subur 2. Jumlah peserta program KB aktif 3. Jumlah PLKB/PKB 	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan KB
16.	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah angkutan darat 2. Jumlah penumpang angkutan darat 	Dinas Perhubungan dan Transportasi
17.	Komunikasi dan Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Website milik Pemda 2. Jumlah dan jenis pameran/expo 	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
18	Pertanahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh bidang tanah dan luasnya 2. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat dan luasnya 	Dinas Penataan Kota
19.	Kesbang dan Politik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Partai Politik 2. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 3. Jumlah LSM, Ormas dan OKP 4. Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan LKP 	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
20.	Otonomi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 2. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan 3. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan 4. Tanggal dan Nomor Perda Penetapan APBD Tahun 2016 5. Tanggal dan Nomor surat Penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP No. 8/2006 6. Tanggal dan nomor surat penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3/2007 7. Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 8. Jumlah APBD tahun yang bersangkutan 9. Realisasi pencapaian PAD 10. Besaran Silpa tahun 2016 11. Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan 12. Jumlah PNS dan CPNS Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 per SKPD dan per urusan 13. Jumlah seluruh SPM tahun 2016 14. Jumlah seluruh MoU yang masih berlaku sampai tahun 2016 15. Jumlah sistem informasi kepegawaian 16. Jumlah Perda Tahun 2016 17. Jumlah Raperda yang disetujui DPRD tahun 2016 18. Jumlah Raperda yang diusulkan oleh DPRD tahun 2016 19. Jumlah Keputusan DPRD dalam tahun 2016 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat 2. BPKAD 3. BKD 4. Badan Diklat 5. BPBD 6. BPTSP 7. BPBJ 8. Dinas Pelayanan Pajak 9. Dinas Pemadam Kebakaran 10. Satpol PP 11. Biro Tata Pemerintahan 12. Biro Hukum 13. Biro Organisasi dan RB 14. Biro KDH dan KLN 15. Biro Umum 16. Biro Perekonomian 17. Biro Penataan Kota dan LH 18. Biro Akas 19. Biro Dikmental 20. Biro Kesos 21. Sekretariat DPRD 22. Walikota Jakarta Pusat 23. Walikota Jakarta Utara 24. Walikota Jakarta Barat 25. Walikota Jakarta Selatan 26. Walikota Jakarta Timur 27. Kabupaten Kepulauan Seribu
		<ol style="list-style-type: none"> 20. Jumlah Keputusan gubernur dan Peraturan Gubernur tahun 2016 21. Opini BPK atas Laporan Keuangan tahun 2015 dan 2016 22. Jumlah Temuan BPK per Desember 2016 	

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
		23. Jumlah temuan BPK yang telah ditindaklanjuti sampai Desember 2016 24. Jumlah penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Pusat/Kementerian/Lembaga Badan Pusat tahun 2016	
21.	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	1. Jumlah anggota PKK 2. Jumlah anggota PKK aktif	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan KB
22.	Sosial	1. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain yang terdapat di suatu daerah 2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 3. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	Dinas Sosial
23.	Budaya	1. Jumlah dan jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah dan jenis sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah sanggar kesenian	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
24.	Statistik	1. Buku 'Provinsi dalam Angka' 2. Buku "PDRB Provinsi"	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25.	Kearsipan	1. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku 2. Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan 2016 3. Jumlah pejabat fungsional kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
26.	Perpustakaan	1. Jumlah koleksi judul buku minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah koleksi buku minimal 2 tahun terakhir 3. Jumlah pengunjung ke perpustakaan setiap tahun minimal 3 tahun terakhir 4. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
27.	Kelautan dan Perikanan	1. Jumlah produksi perikanan setiap tahun minimal 2 tahun terakhir 2. Target daerah dalam produksi perikanan 3. Nilai ekspor hasil perikanan per tahun minimal 2 tahun terakhir 4. Target ekspor hasil perikanan per tahun (tahun 2016) 5. Jumlah konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir 6. Target konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahun terakhir	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
28.	Pertanian	1. Produksi tanaman padi (ton) tahun 2016 2. Luas areal tanaman padi (ha) tahun 2016 3. Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian (Rp Miliar) tahun 2016 4. Jumlah total PDRB tahun 2016	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Urusan	Data Pokok yang Diperlukan	SKPD/UKPD
29.	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2016 2. Luas total hutan dan lahan kritis tahun 2016 3. Luas kerusakan kawasan hutan (ha) tahun 2016 4. Luas kawasan hutan (ha) tahun 2016 	Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
30.	Energi dan SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Luas pengembangan liar yang ditertibkan tahun 2016 2. Luas area penambangan yang liar tahun 2016 3. Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan tahun 2016 4. Jumlah total PDRB tahun 2016 	Dinas Perindustrian dan Energi
31.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kunjungan wisata minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah industri pariwisata minimal 2 tahun terakhir 3. PAD sektor pariwisata minimal 2 tahun terakhir 4. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata (Rp triliun) tahun 2016 5. Jumlah total PDRB (Rp Triliun) tahun 2016 	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
32.	Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri (Rp triliun) tahun 2016 2. Jumlah industri minimal 2 tahun terakhir 	Dinas Perindustrian dan Energi
33.	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan tahun 2016 2. Nilai ekspor tahun 2016 3. Nilai impor tahun 2016 	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
34.	Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah transmigran swakarsa tahun 2016 2. Jumlah seluruh transmigran tahun 2016 	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Dr. Sumarsono, MDM.

NIP. 195902221985031001

Lampiran V : Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Nomor 7 TAHUN 2017
Tanggal 22 Januari 2017

BIODATA LIAISON OFFICER
LPPD TAHUN 2016

Nama : _____

NIP/NRK : _____

Pangkat/Golongan : _____

Jabatan : _____

SKPD/UKPD : _____

Alamat kantor : _____

Telp dan Fax kantor : _____

No. Handphone : _____

Alamat email : _____

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta,

Dr. Sumarsono, MDM.
NIP. 195902221985031001